



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41/M-DAG/PER/7/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU  
BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG  
DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/6/2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/6/2014 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/6/2014 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/6/2014 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/ Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, wajib :
  - a. melaksanakan tugas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
  - d. menjaga dan memelihara hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi setelah kegiatan pembangunan selesai;
  - e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan melalui:
  - a. alokasi Anggaran Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

- b. alokasi Anggaran Dana Optimalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat telaahan kembali dari Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan persetujuan dari Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Persetujuan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
2. Lampiran I dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/6/2014 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2014

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 41/M-DAG/PER/7/2014  
 TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

**DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA  
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
 SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**A. ALOKASI ANGGARAN REGULER**

| NO          | PENERIMA TUGAS                     | ALOKASI<br>(Rupiah) | KETERANGAN                                  |
|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Provinsi Aceh</b>               |                     |                                             |
|             | 1 Bupati Aceh Barat Daya           | 3,500,000,000       | Pasar Tipe A/B                              |
| <b>II</b>   | <b>Provinsi Sumatera Utara</b>     |                     |                                             |
|             | 2 Bupati Toba Samosir              | 8,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>III</b>  | <b>Provinsi Sumatera Selatan</b>   |                     |                                             |
|             | 3 Bupati Muara Enim                | 6,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 4 Walikota Palembang               | 12,000,000,000      | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 5 Walikota Pagar Alam              | 6,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>IV</b>   | <b>Provinsi Jambi</b>              |                     |                                             |
|             | 6 Gubernur Jambi                   | 12,000,000,000      | Pasar Percontohan (Tipe A/B)<br>dan PDR/PDP |
| <b>V</b>    | <b>Provinsi Lampung</b>            |                     |                                             |
|             | 7 Bupati Tulang Bawang             | 6,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>VI</b>   | <b>Provinsi Kalimantan Selatan</b> |                     |                                             |
|             | 8 Bupati Banjar                    | 10,000,000,000      | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 9 Bupati Hulu Sungai Selatan       | 8,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 10 Bupati Tapin                    | 8,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>VII</b>  | <b>Provinsi Kalimantan Timur</b>   |                     |                                             |
|             | 11 Bupati Penajam Paser Utara      | 7,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>VIII</b> | <b>Provinsi Banten</b>             |                     |                                             |
|             | 12 Bupati Serang                   | 8,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>IX</b>   | <b>Provinsi Jawa Barat</b>         |                     |                                             |
|             | 13 Bupati Tasikmalaya              | 9,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 14 Bupati Cirebon                  | 6,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>X</b>    | <b>Provinsi Jawa Tengah</b>        |                     |                                             |
|             | 15 Bupati Tegal                    | 7,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 16 Bupati Batang                   | 6,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>XI</b>   | <b>Provinsi Jawa Timur</b>         |                     |                                             |
|             | 17 Walikota Blitar                 | 7,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 18 Bupati Lamongan                 | 9,000,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
| <b>XII</b>  | <b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>   |                     |                                             |
|             | 19 Bupati Pangkajene Kepulauan     | 7,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |
|             | 20 Bupati Sinjai                   | 7,500,000,000       | Pasar Percontohan (Tipe A/B)                |

| NO           | PENERIMA TUGAS                      | ALOKASI<br>(Rupiah)    | KETERANGAN                   |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|              | 21 Bupati Selayar                   | 3,000,000,000          | Gudang Non SRG               |
| <b>XIII</b>  | <b>Provinsi Sulawesi Utara</b>      |                        |                              |
|              | 22 Walikota Kotamobagu              | 10,000,000,000         | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
|              | 23 Bupati Minahasa                  | 7,000,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
| <b>XIV</b>   | <b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>     |                        |                              |
|              | 24 Bupati Parigi Moutong            | 9,000,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
|              | 25 Bupati Tojo Una-una              | 9,000,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
| <b>XV</b>    | <b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>   |                        |                              |
|              | 26 Bupati Bombana                   | 9,500,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
| <b>XVI</b>   | <b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> |                        |                              |
|              | 27 Walikota Bima                    | 6,000,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
| <b>XVII</b>  | <b>Provinsi Maluku Utara</b>        |                        |                              |
|              | 28 Bupati Halmahera Barat           | 9,000,000,000          | Pasar Tipe A/B dan PDR/PDP   |
| <b>XVIII</b> | <b>Provinsi Maluku</b>              |                        |                              |
|              | 29 Bupati Buru Selatan              | 3,000,000,000          | Gudang Non SRG               |
| <b>XIX</b>   | <b>Provinsi Papua</b>               |                        |                              |
|              | 30 Bupati Sarmi                     | 9,000,000,000          | Pasar Percontohan (Tipe A/B) |
|              | 31 Bupati Paniai                    | 9,000,000,000          | Pasar Tipe A/B               |
|              | 32 Bupati Jayawijaya                | 6,000,000,000          | PDR/PDP                      |
| <b>Total</b> |                                     | <b>245,000,000,000</b> |                              |

**B. ALOKASI ANGGARAN DANA OPTIMALISASI**

| NO         | PENERIMA TUGAS                   | ALOKASI<br>(Rupiah) | KETERANGAN     |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Provinsi Aceh</b>             |                     |                |
|            | 1 Walikota Langsa                | 3,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 2 Walikota Lhokseumawe           | 4,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 3 Bupati Aceh Utara              | 3,250,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 4 Bupati Aceh Besar              | 4,250,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>II</b>  | <b>Provinsi Sumatera Utara</b>   |                     |                |
|            | 5 Bupati Labuhan Batu Utara      | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 6 Bupati Humbang Hasundutan      | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>III</b> | <b>Provinsi Sumatera Selatan</b> |                     |                |
|            | 7 Walikota Lubuk Linggau         | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>IV</b>  | <b>Provinsi Jambi</b>            |                     |                |
|            | 8 Bupati Sarolangun              | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>V</b>   | <b>Provinsi Riau</b>             |                     |                |
|            | 9 Bupati Meranti                 | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 10 Bupati Pelalawan              | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>VI</b>  | <b>Provinsi Jawa Barat</b>       |                     |                |
|            | 11 Bupati Cianjur                | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
| <b>VII</b> | <b>Provinsi Jawa Tengah</b>      |                     |                |
|            | 12 Walikota Surakarta            | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 13 Bupati Cilacap                | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 14 Bupati Demak                  | 5,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |
|            | 15 Bupati Kebumen                | 8,000,000,000       | Pasar Tipe A/B |

| NO           | PENERIMA TUGAS                      | ALOKASI<br>(Rupiah)    | KETERANGAN     |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
|              | 16 Bupati Purbalingga               | 3,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 17 Bupati Brebes                    | 3,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>VIII</b>  | <b>Provinsi DI Yogyakarta</b>       |                        |                |
|              | 18 Bupati Kulon Progo               | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 19 Bupati Gunung Kidul              | 3,500,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>IX</b>    | <b>Provinsi Jawa Timur</b>          |                        |                |
|              | 20 Bupati Bojonegoro                | 4,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 21 Bupati Bondowoso                 | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 22 Walikota Malang                  | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>X</b>     | <b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>    |                        |                |
|              | 23 Bupati Maros                     | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 24 Bupati Sidenreng Rappang         | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 25 Bupati Wajo                      | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 26 Bupati Bone                      | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 27 Walikota Pare-pare               | 7,500,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 28 Bupati Bantaeng                  | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 29 Bupati Gowa                      | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 30 Bupati Bulukumba                 | 7,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>XI</b>    | <b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>   |                        |                |
|              | 31 Walikota Bau-Bau                 | 7,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 32 Bupati Kolaka Utara              | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 33 Bupati Konawe Selatan            | 6,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>XII</b>   | <b>Provinsi Gorontalo</b>           |                        |                |
|              | 34 Bupati Pohuwatu                  | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 35 Bupati Boalemo                   | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 36 Bupati Gorontalo                 | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>XIII</b>  | <b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> |                        |                |
|              | 37 Bupati Bima                      | 3,500,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>XIV</b>   | <b>Provinsi Maluku</b>              |                        |                |
|              | 38 Bupati Seram Bagian Timur        | 4,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 39 Bupati Buru                      | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
|              | 40 Walikota Ambon                   | 5,000,000,000          | Pasar Tipe A/B |
| <b>Total</b> |                                     | <b>196,000,000,000</b> |                |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH